



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN SEKJEN, IRJEN, DIRJEN BINA KONSTRUKSI, DAN KEPALA
BPSDM KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
2. Membahas Program Kerja Tahun 2023.
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
39 dari 56 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Sukur H. Nababan, S.T.
5. Ir. Sudjadi
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
7. Sri Rahayu
8. Ir. Effendi Sianipar
9. Harvey B. Malaihollo
10. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
5. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 4. Sri Wahyuni
 5. Drs. Fadholi, M. Ikom.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 3. Lasmi Indaryani, S.E.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 2. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 2. H. Boyman Harun, S.H.
 3. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. Mohammad Zainal Fatah)
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI (Ir. T. Iskandar, M.T.)
3. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.)
4. Kepala BPSDM Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. H. Khalawi. AH, MSC., M.M.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Izinkan kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 10.20 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR yang telah hadir dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Turut menghadirkan juga pengurus LPJK dan menghadirkan secara virtual Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di Seluruh Indonesia

Pimpinan, Anggota Komisi V yang kami hormati.

Untuk agenda pertama terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari para Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM bagaimana hasil akhir pencapaian realisasi anggaran masing-masing unit Eselon I pada Tahun 2022 sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR RI pada rapat-rapat terdahulu.

Adapun terkait dengan agenda kedua yaitu pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan bahwa Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 586,88 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar 90,27 miliar, Dirjen Bina Konstruksi sebesar 50...567,64 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 399,74 miliar. Dengan alokasi anggaran ini, kami ingin mengetahui bagaimana Pagu Anggaran ini direalisasikan sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang sudah disampaikan pada rapat-rapat terdahulu.

Selanjutnya, ada beberapa hal pula ingin kami sampaikan terkait dengan pengawasan yang sudah kami lakukan dalam waktu berjalan berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, ada beberapa hal tersebut ingin kami sampaikan pada rapat yang berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini:

1. Diperlukan tata kelola internal yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan dukungan manajemen dan administrasi di Kementerian PUPR.
2. Dibutuhkan untuk selalu meningkatkan pengawasan internal dalam rangka meminimalisir temuan dan permasalahan pemanfaatan keuangan negara di berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur.
3. Perlunya memperbanyak jumlah pelatihan dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM di sektor Kementerian PUPR.
4. Perlu meningkatkan evaluasi terhadap setiap tahapan proses tender dalam mewujudkan pelaksanaan tender yang lebih transparan dan akuntabel.

Bapak-Ibu sekalian.

Demikian pengantar rapat singkat pada siang hari ini, untuk selanjutnya kami persilakan masing-masing Direktorat Jenderal untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan materi yang sudah kami sampaikan juga diundangan yang Bapak-Bapak sekalian sudah terima.

Saya persilakan terlebih dulu mulai dari Pak Sekjen.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. MOHAMMAD ZAINAL FATAH):

Terima kasih banyak, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Bapak Ketua, Wakil Ketua, para Pimpinan Komisi V, serta Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Terima kasih banyak atas perkenan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan kami berempat, oleh karena itu sesuai dengan izin dari pimpinan maka izinkan kami untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan dan bersesuaian dengan topik yang telah diarahkan.

Ibu-Bapak hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, unit organisasi sekretariat jenderal terdiri dari 7 biro dan 3 pusat: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana; Biro Keuangan; Biro Umum; Biro Hukum; Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;

Biro Komunikasi Publik; Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan; Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR untuk Tahun 2022 berfokus pada 3 aspek yaitu: Peningkatan kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR; integrasi sistem informasi; dan peningkatan kesehatan organisasi. Ini didukung oleh beberapa tema dalam pencapaiannya. Dalam hal peningkatan kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR diupayakan dengan melakukan peningkatan berbagai layanan yaitu layanan pengelolaan perencanaan keuangan BMN dan umum. BMN adalah Barang Milik Negara, kemudian layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasi, pengadministrasian pegawai.

Di PUPR, merupakan pengampu untuk jabatan fungsional keteknikan Bidang PUPR, sehingga kami juga melayani bukan hanya di Pegawai Kementerian PUPR tapi seluruh pegawai di seluruh Indonesia yang mengambil jabatan fungsional ke-PUPR-an.

Kemudian, layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum, ini menyangkut banyak penyelarasan produk-produk hukum bukan hanya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR tapi juga oleh kementerian-kementerian terkait lainnya. Kemudian, fasilitasi dalam perencanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah, penyelenggaraan komunikasi publik yang modern terpadu dan berorientasi publik serta layanan kajian dan pemantauan kebijakan.

Untuk integrasi sistem informasi dilakukan dalam rangka transformasi layanan digital untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di antaranya adalah layanan perizinan, perumahan, data dan informasi. Dalam hal peningkatan kesehatan organisasi telah dilakukan melalui beberapa upaya antara lain peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian PUPR, peningkatan kualitas tata kelola keuangan, dan peningkatan Nilai SAKIP Kementerian PUPR.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.

Pagu akhir Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022 sebesar 569,45 miliar dengan realisasi keuangan sebesar 544,01 miliar atau mencapai 97,29 % dan fisik sebesar 99,82%, angka ini adalah angka yang relatif lebih baik dibandingkan tahun anggaran sebelumnya di mana pada Tahun 2021 sekjen progresnya mencapai 96,7%. Dengan demikian, maka pada Pagu Anggaran 2022 yang tidak terserap sebanyak 15,44 miliar terdiri dari sisa belanja pegawai, sisa kontraktual, antara lain sewa keperluan kantor, perjalanan dinas dan kegiatan tidak terlaksana lainnya 8,31 M. Untuk capaian dan kinerja kegiatan Sekretaris Jenderal pada tahun 2022 antara lain tentu pencapaian ini tidak mungkin kami bisa capai tanpa kebersamaan, saran-saran dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR yang kami hormati.

Dalam hal pengelolaan perencanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta kerja sama luar negeri berupa administrasi pelaksanaan

anggaran di 694 Satker, kami juga melakukan 43 rencana aksi nasional, ini adalah rencana aksi yang bukan hanya disiapkan oleh Kementerian PUPR, tetapi kami harus menyusun bergabung ke dalam rencana aksi yang disusun oleh kementerian yang lain tetapi di bawah koordinasi apakah oleh KPK ataukah oleh kementerian-kementerian koordinator.

Kemudian, dokumen kerja sama internasional ini mencakup 42 register pinjaman dan lima hibah luar negeri. Artinya, hingga saat ini Kementerian PUPR masih menjalankan 42 pinjaman luar negeri. Kemudian, dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana berupa layanan data dan informasi yang mencakup 40.325 pegawai melalui IHRM. Angka 40.325 pegawai adalah angka yang jauh di bawah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja.

Berdasarkan analisis beban kerja yang tentu ini difasilitasi dan didampingi oleh Kementerian PANRB, Kementerian PUPR seharusnya membutuhkan 46.000 pegawai, dengan demikian ada selisih 5.000 sekian, yang kinerjanya dijalankan oleh 40.325 pegawai ini. Kemudian, dalam hal pengelolaan keuangan berupa pendampingan dan konsolidasi laporan keuangan dari 694 Satker dan 13 laporan pinjaman hibah luar negeri, pinjaman dan hibah luar negeri, penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan capaian 81,63%, *alhamdulillah* ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, nanti mungkin Pak Irjen juga bisa menambahkan informasinya serta penetapan 333 pejabat perbendaharaan.

Dalam hal pengelolaan umum berupa rehabilitasi bangunan gedung di 13 lokasi, perbaikan utilitas di 23 lokasi, pendampingan penataan arsip di 15 unit kerja dan penetapan status penggunaan di 28.099 unit BMN yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentang pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum berupa pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebanyak 198 produk hukum dan 37 MoU atau perjanjian kerja sama serta advokasi terhadap 100 perkara dan 9 pendapat hukum.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara, kami melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, terkait revaluasi ada 1.184 BMN, tidak ditemukan senilai 326,60 miliar dan penetapan 4.251 persetujuan hibah. Hibah adalah hasil-hasil pembangunan yang dihasilkan atau dilakukan oleh Kementerian PUPR dan kemudian diserahkan kepada penerima, apakah Pemerintah Daerah ataupun lembaga-lembaga yang ada di masing-masing daerah.

Kemudian, penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik berupa kenaikan, kami laporkan bahwa terjadi kenaikan jumlah *followers* yang saat ini sebanyak 258.906 *followers*, ini sama dengan kita, apa kami mengalami kenaikan 11,42% dalam satu tahun anggaran, sedangkan sentimen positif artikel siaran di media sebanyak 38.018 berita positif, peneringkatan keterbukaan informasi publik dalam kategori informatif dengan nilai 96,62 penilaian penyelenggaraan pelayanan publik dalam kategori b dengan nilai

86,2 dan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik PUPR dalam kategori b dengan nilai 83,59.

Ibu-Bapak hadirin yang kami hormati.

Pengelolaan data dan teknologi di bidang PUPR, berupa, 295 sistem aplikasi, pengembangan 2 Super Apps, penyediaan 392 layanan data spasial dan statistik dan 52 tema data spasial dan Open Geo API. Dalam hal penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah berupa pemantauan dan evaluasi terhadap 536 Pemerintah Daerah, sosialisasi kebijakan DAK di 541 Pemda, verifikasi data dan penilaian usulan DAK di 497 Pemda, bimbingan teknis penerapan standar pelayanan minimal Bidang PUPR di 508 Kabupaten/Kota. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penugasan dan tugas-tugas dan kebijakan Bapak Menteri, kami juga melakukan pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan berupa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atas 276 laporan serta penyusunan 8 *policy brief* dan 8 *policy memo*.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Pada Tahun 2022 Kementerian PUPR meraih sejumlah penghargaan antara lain, ini mungkin diantaranya adalah:

1. BKN (Badan Kepegawaian Negara) BKN Award Tahun 2022 memberi Kementerian PUPR pada peringkat satu atas kategori implementasi penerapan manajemen kinerja, peringkat empat pada kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dan peringkat kelima pada kategori penerapan pemanfaatan data dan sistem informasi dan CAT.
2. Penghargaan kerja sama internasional dari *Ambassador of The Republic of Korea* atas kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Republik Korea dengan Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian PUPR.
3. Kemudian penghargaan juga kami dapatkan dari penghargaan internasional dari *The Building Center of Japan*.
4. Kemudian, kami juga mendapatkan peringkat satu pada pengukuran tingkat kepatuhan pada pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN Tahun 2022 yang kami terima dari Komisi ASN.
5. Kemudian, dari BPK kami mendapatkan opini wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
6. Kementerian PUPR juga masuk pada 10 besar Kementerian/Lembaga dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 terbaik, ini diberikan oleh Kementerian Keuangan.
7. Kementerian ESDM memberikan, memberi penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi Tahun 2022, sebagai juara satu pada kategori Gedung Hijau untuk Gedung G Kementerian PUPR dan juara dua pada kategori Gedung Pemerintahan Pusat untuk Gedung G Kementerian PUPR, ini gedung yang sama.

8. Penghargaan juga kami dapatkan berupa penghargaan kantor kementerian dengan koleksi jenis vegetasi terbanyak ada 105 jenis yang kami terima dari Museum Rekor...Museum Rekor Indonesia. Penghargaan juga kami dapatkan dari MURI berupa kantor kementerian dengan penerapan teknologi bangunan dan *scalpture* terbaik, dalam hal ini teknologi yang diakses kemarin adalah Solar Panel, *Seruran Of*, Taman Sanitas, Tungku Sanira, Mini Heater, SIPESAT.
9. Kami mendapatkan penghargaan juga dari ANRI, arsip...arsip, dalam hal arsip yaitu Predikat A atau memuaskan atas pengawasan kearsipan.
10. Kami mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Hukum dan HAM berupa penghargaan peringkat 2 terbaik, penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022, peringkat pertamanya adalah Kementerian Hukum dan HAM dan PUPR adalah satu-satunya kementerian di luar Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan penghargaan ini.
11. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM juga, ini bersama-sama dengan Kemenko Marves memberikan penghargaan JDIH di bidang maritim dan investasi dalam kategori pengelolaan JDIH terbaik.
12. Dari Lembaga Manajemen Aset Negara, kami mendapatkan penghargaan tertinggi untuk kategori Maestro dalam Kompetisi Asset Manager Tahun 2022.
13. Kami juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan untuk juara satu dalam lomba cerdas cermat untuk kategori ASN Pemerintah Pusat pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.
14. Dari Kementerian Keuangan juga memberi kami sebagai juara satu pada kelompok tiga yaitu kategori sertifikasi BMN kementerian lembaga yang memiliki jumlah satuan kerja lebih dari 100, *nah*, dalam hal ini untuk sertifikasi BMN, target sertifikasi BMN secara nasional kurang lebih 80% di antaranya dipenuhi dan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
15. Dari PL Indonesia Award 2022, kami mendapatkan Gold Winner untuk sub kategori media sosial, Silver Winner untuk subkategori media cetak, majalah kiprah, volume 3 Oktober 2021.
16. Kami juga mendapatkan peringkat ketiga kategori kementerian terbaik atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu, ini berupa Anugerah Layanan Investasi 2022 dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
17. Dalam hal kehumasan, kami mendapatkan Anugerah Humas Indonesia 2022 berupa kategori pemimpin dan institusi terpopuler di media digital, tentu ini diberikan kepada Bapak Menteri PUPR, kemudian *bronze winner* untuk subkategori media sosial twitter dan bronze winner untuk kategori pelayanan informasi publik.
18. Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik di Tahun 2022 untuk kategori kementerian sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif kami peroleh dari Komisi Informasi Pusat.

19. Dalam hal pengelolaan data spasial, Badan Informasi Geospasial memberi atau menganugerahkan Kementerian PUPR berupa Bhumendala Rajata, yaitu medali perak untuk implementasi pengelolaan data spasial dengan melibatkan produsen data di internal kementerian lembaga. Bhumendala Kencana yaitu medali emas untuk pemanfaatan simpul jaringan data special...data spasial di internal Kementerian/Lembaga dan Bhumendala untuk nama Rupa Bumi untuk kementerian yang telah menyelaraskan nama infrastruktur yang dibangun, dengan nama atau toponimi dalam rupa, peta rupa bumi.
20. Penghargaan atas kerja sama dan bantuan dalam peningkatan Jalan Sulawesi Tenggara melalui program hibah jalan daerah, ini kami peroleh dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati.

Pada Tahun 2023, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dapat kami laporkan sebagai berikut: Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 586,88 miliar. Berdasarkan jenis belanja, Pagu belanja operasional, belanja rutin dialokasikan sebesar 290,32 miliar atau 49,47% terdiri dari belanja pegawai 94,66 miliar dan belanja barang operasional 195,66 miliar. Untuk belanja non rutin dialokasikan sebesar 296,56 miliar atau 50,50% di antaranya. Pagu Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal yaitu pengelolaan perencanaan sebesar 44,93 miliar dengan target layanan utama antara lain administrasi pelaksanaan anggaran di 694 Satker, 45 rencana aksi nasional untuk program tematik lainnya, perencanaan dan pemantauan 42 register pinjaman dan 4 hibah luar negeri.

Pengelolaan dan pengadministrasian pegawai organisasi dan tata laksana sebesar 28,1 miliar, dengan target layanan utama antara lain layanan data dan informasi melalui e-HRM untuk 4.325 pegawai dan manajemen SDM untuk 7.865 pegawai. Untuk pengelolaan keuangan, dialokasikan sebesar 24,15 miliar dengan target layanan utama antara lain: fasilitasi penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan atas 694 kuasa pengguna anggaran atau barang dan 13 Laporan PHLN, serta penyusunan enam, *eh* mohon maaf, penyusunan 8 NSP Bidang Keuangan, sertifikasi 300 pejabat perbendaharaan, penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan target 75% telah sesuai rekomendasi serta penetapan 4.320 pejabat perbendaharaan yang akan bertugas di 694 kuasa pengguna anggaran atau barang.

Dalam hal pengelolaan umum, dialokasikan 183,54 miliar dengan target layanan utama antara lain 30 lokasi rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung, 40 lokasi pemeliharaan lanskap dan prasarana lingkungan, 50 lokasi perbaikan sarana utilitas layanan poliklinik kantor pusat pencegahan Covid-19 dan 115 kegiatan protokoler.

Dalam hal pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta advokasi hukum sebesar 20,41 miliar dengan target layanan utama

adalah penyusunan 35 peraturan produk hukum, 65 penanganan dan pendampingan perkara, satu laporan dokumentasi dan informasi hukum, satu kegiatan *monitoring* kepatuhan *intern* dan 20 fasilitasi penyusunan kerja sama antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk biro hukum ini diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan *intern* di bidang, di kesekjenan.

Dalam hal pengelolaan barang milik negara dialokasikan sebesar 38,46 miliar dengan target layanan utama, optimalisasi pemanfaatan BMN di 34 provinsi, ini BMN-BMN yang tersebar di seluruh provinsi kami kelola, tentu dengan mengoptimalkan. Kita sedang mencari cara agar ini bisa dikerjasamakan sehingga BMN ini tidak *idle*.

Percepatan tindak lanjut LHP 2019-2021, kemudian penyusunan BUMN *auditted* dan *unauditted* 2022, serta Laporan BMN Semester I Tahun 2023 dan sertifikasi tanah BMN yang direncanakan akan mencapai 8.239 bidang. Kemudian penyelenggaraan dan pembinaan informasi publik sebesar 37 miliar dengan target layanan utama adalah 564 kegiatan kehumasan, 65 publikasi di berbagai media, 569 bahan informasi pimpinan, 500 layanan informasi publik kementerian dan pengelolaan perpustakaan.

Untuk pengkajian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan sebesar 34,49 miliar dengan target layanan utama adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 250 laporan atau 1.500 kebijakan menteri, 14 *policy brief* atau *policy memo*, pembinaan 179 jabatan fungsional analis kebijakan dan 60 agenda kunjungan kerja menteri.

Dalam hal pengelolaan data dan teknologi informasi Bidang PUPR, dialokasikan sebesar 142,39% dengan target layanan utama antara lain layanan data dan informasi terhadap 40.326 Pegawai PUPR, pengelolaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan portal sembilan perizinan, kolaborasi digital dua Super Apps, dan 30.000 akun *work collaboration* pengembangan dan aplikasi BRAVO dan Sahabat PUPR. Terbesar, alokasi pada pengolahan data dan teknologi informasi ini digunakan untuk belanja sewa, apakah dia *bandwidth* maupun dengan google untuk *cloud system*.

Dalam hal penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah sebesar 33,51 miliar dengan target layanan utama antara lain pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap 497 Pemda penerima DAK Tahun 2023, sosialisasi kebijakan DAK 2024 kepada Pemerintah Daerah, verifikasi data dan penilaian usulan DAK Tahun 2024, bimbingan teknis penerapan standar pelayanan minimal Bidang PUPR di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota dan pendampingan PHJD Tahun 2023 di 3 KSPN yang meliputi 3 provinsi dan 4 kabupaten.

Untuk meningkatkan kualitas memberikan kemudahan dan kecepatan layanan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, melakukan transformasi di bidang pelayanan publik antara lain melalui e-Pusaka untuk penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan PUPR, Bravo PUPR untuk menjalankan

aplikasi *mobile* secara terintegrasi dengan fitur antara lain: e-Presensi; e-HRM; e-Kinerja; e-Monitoring; JDIH; TNDE; dan Berita PUPR. Ini sudah bisa dijalankan dari *mobile...handphone* masing-masing.

Pelayanan publik terpadu untuk kemudahan dan kecepatan layanan publik, oleh karena itu kami membuka satu tempat premium yaitu di lantai dasar gedung utama yang sudah kita siapkan dan sekarang *alhamdulillah* sudah dapat dijalankan dengan baik. Untuk portal perizinan, ini dibuat untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan berusaha yang telah terintegrasi dengan OSS yang dijalankan di BKPM. Kementerian PUPR saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi yang sebagaimana sudah pernah dilaporkan sebelumnya dan jika diizinkan mungkin nanti dengan staf kami bisa secara teknis, fasilitasi untuk mengoperasikannya.

Kemudian, e-Keluangan untuk kemudahan pelayanan keuangan secara terintegrasi dengan fitur antara lain: penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* pemerintah,; kemudian pemantauan progres tindak lanjut LHP sebagai upaya percepatan penuntasan rekomendasi BPK; pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak karena kami juga harus monitor ini yang di kita lakukan secara *online* dengan yang sudah diintegrasikan dengan sistem yang dijalankan dengan Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan RI.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Demikian, laporan kami untuk agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, mohon berkenan masukan dan saran untuk memperbaikinya, makasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak sekjen. Mempersingkat waktu, selanjutnya saya persilakan Pak Inspektorat Jenderal. Silakan, Pak Iskandar.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. T. ISKANDAR, M.T.):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat dan kami hormati Bapak Ketua,
Wakil Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Sesuai agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2023.

Di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal memperoleh daftar isian penggunaan anggaran sebesar 101,7 miliar dan kemudian ada terdapat proses penyesuaian menjadi 84,27 miliar dan akhirnya ada kegiatan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap anggaran belanja pegawai dan anggaran blokir otomatis *adjustment* senilai 5 miliar sehingga Pagu Anggaran di Inspektorat Jenderal sebesar 80,57 miliar. Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Inspektorat Jenderal merealisasikan sebesar 79,936 miliar atau 99,22%, dengan realisasi capaian fisik sebesar 99,74%.

Di dalam hal ini, kebijakan pengawasan Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tiga fokus yaitu:

1. Pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap kegiatan derektif dan strategis serta pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
2. Pengawasan terhadap penatausahaan BMN di Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap perencanaan dan penatausahaan BMN di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik melalui pengawasan atas pengelolaan penyelenggaraan SPIP, penerapan manajemen risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan, peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Di dalam realisasi pencapaian *intern* sampai dengan Tanggal 31 Desember telah dilaksanakan berupa pelaksanaan audit, yaitu:

1. Audit kinerja.
2. Audit dengan tujuan tertentu antara lain pembangunan rumah susun dan pembangunan prasarana PON Papua.
3. Audit yang tidak terprogramkan yaitu audit atas perintah direktif Menteri PUPR ini termasuk audit investigasi atas informasi penyimpangan, audit atas permohonan APIA, dan unit organisasi serta pengaduan masyarakat.

Selanjutnya, pelaksanaan *review* berdasarkan *review* Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Tahun 2021, *review* Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi hal ini berupa evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, evaluasi sistem akuntabilitas, instansi pemerintah serta evaluasi internal unit kerja zona integritas menuju WBK, WBBN.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan berupa pemantauan THP BPK RI, BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal, pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berupa pendampingan kegiatan pelaksanaan pembangunan

pendukung acara internasional di Provinsi Bali, NTT, NTB, DKI Jakarta yang merupakan penugasan kepada Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021.

Selanjutnya, pendampingan penanganan dampak bencana antara lain akibat siklon tropis di NTB, NTT, dan erupsi Gunung Semeru serta Gempa Bumi Cianjur. Pendampingan pengendalian gratifikasi serta koordinasi kerja sama pengawasan, pengamanan, pembangunan infrastruktur dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPKP.

Pelaksanaan pengawasan telah menghasilkan *output* dalam laporan hasil pengawasan melebihi rencana selama tahun 2022, status sampai dengan akhir tahun 2022 berupa di mana untuk kegiatan pengawasan audit direncanakan dengan 369 Laporan Hasil Pemeriksaan di mana realisasi mencapai 396 LHP dengan persentase 107,31%.

Yang selanjutnya pengawasan terhadap *review* sebanyak 276 laporan hasil pemeriksaan, realisasi adalah 558 adalah capaian 202,17%, hal ini juga termasuk kondisi *review* usulan revisi anggaran usulan pendanaan penanganan bencana dan usulan daripada *review* terhadap kontrak *multiyears* termasuk penyiapan pembangunan IKN.

Selanjutnya untuk evaluasi, pengawasan evaluasi direncanakan sebanyak 62 LHP ini tercapai 41 yaitu sebesar 66,12%, ini ada kegiatan-kegiatan yang tertunda di dalam pelaksanaan seperti ada beberapa kegiatan terhadap evaluasi kegiatan pembangunan bendungan, infrastruktur koneksitas, dan kesiapan pembangunan IKN.

Selanjutnya, pengawasan pemantauan ada rencana 46 ini direalisasikan sebesar 591 laporan ini mencapai di atas 1.000%, dikarenakan karena penilaian tindak lanjut inspektorat jenderal yang mengalami peningkatan dikarenakan ada persyaratan bebas temuan dari *profiling* terhadap pejabat yang diusulkan.

Pengawasan lainnya dari rencana laporan hasil pemeriksaan 63 laporan, realisasi capaian 146 dengan 231,74%. Jadi, dengan kondisi rencana yang direncanakan Tahun 2022 sebanyak 816 LHP, capaian realisasi 1.751 ekuivalen 214,58%. Untuk Tahun 2019, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan survei penilaian integritas Tahun 2021. Kementerian PUPR memperoleh nilai indeks 82,64 yang lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional.

Tahun 2022, diperoleh nilai indeks 73,59% yang lebih tinggi dari nilai indeks rata-rata nasional, namun di dalam hal capaian dibandingkan tahun yang lalu, terjadi penurunan dikarenakan Kementerian PUPR menjadi *pilot project* perluasan sampel dan responden serta terdapat tambahan indikator-indikator dalam penilaian antara lain, keberadaan kampanye/himbauan anti korupsi, adanya media pengaduan pelaporan korupsi, perlindungan terhadap pelapor korupsi dan tindak lanjut terhadap laporan korupsi.

Dalam hal pengendalian gratifikasi Kementerian PUPR yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR memperoleh peringkat ketiga dari 33 kementerian pada penilaian implementasi program pengendalian gratifikasi Triwulan ke IV Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPK dengan nilai 94,26.

Selanjutnya, sesuai dengan tema rencana kegiatan pemerintah Tahun Anggaran 2023 yaitu peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan, Inspektorat Jenderal berkomitmen melaksanakan pengawasan *intern* dengan fokus kepada tiga hal yang akan dituangkan dalam kebijakan pengawasan program kerja pengawasan Tahun Anggaran 2023, meliputi:

1. Pengawasan penyelenggaraan infrastruktur Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap kegiatan direktif dan prioritas antara lain: Kegiatan Pembangunan IKN, Pembangunan PSN dan prioritas nasional, rehab dan rekon akibat bencana, dan prioritas utama Kementerian PUPR Tahun 2023, antara lain:
 - a. Penyelesaian *multiyears contract*,
 - b. Pembayaran hutang pekerjaan,
 - c. Pembayaran eskalasi,
 - d. Program padat karya, serta
 - e. Pengawasan atas dukungan manajemen penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
2. Pengawasan terhadap penatausahaan barang milik negara Kementerian PUPR dengan tema pengawasan terhadap perencanaan penatausahaan barang milik negara di seluruh unit organisasi Kementerian PUPR termasuk pengawasan dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik *good governance* melalui:
 - a. Pengawasan atas penyelenggaraan SPIP penerapan manajemen resiko,
 - b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan,
 - c. Peningkatan kepatuhan dan integritas aparatur, serta
 - d. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan.

Di dalam objek pengawasan Tahun Anggaran 2023 yaitu terhadap pengelolaan anggaran Kementerian PUPR sebesar 125,76 triliun yang dikelola oleh 10 unit organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui 186 UPT Balai pada 694 satuan kerja dan 2.252 PPK di mana jumlah kontraktual sebanyak lebih kurang 4.666 dan kegiatan swakelola sebanyak 14.732 kegiatan di mana di dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh auditor sebanyak 160 orang auditor yang ada di inspektorat jenderal juga melakukan penanganan pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan proses pemilihan barang dan jasa termasuk kegiatan sanggah maupun sanggah banding yang dialamatkan atau ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal.

Untuk kegiatan Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi DIPA sebanyak 90,26 miliar dengan penjelasan anggaran per unit jenis belanja anggaran sebagai berikut:

1. Belanja pegawai dan belanja barang sebesar 87,73 miliar yang terdiri dari belanja gaji tunjangan pegawai sebesar 42,49 miliar.
2. Belanja barang sebesar 45,24 miliar termasuk anggaran di dalam hal pengawasan intern 35,54 miliar untuk pelaksanaan audit, *review* evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dan kegiatan pengolahan pengawasan *intern* dan 9,7 miliar digunakan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana perkantoran, untuk belanja modal sebesar 2,53 miliar untuk peningkatan prasarana perkantoran di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya, pengelompokan rencana Pagu Anggaran secara konkret dilaksanakan untuk pelaksanaan audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu sebesar 11,21 miliar. Pelaksanaan *review* antara lain berupa *review* laporan keuangan, usulan rencana BMN dan usulan RKA K/L, usulan revisi anggaran, usulan kontrak tahun jamak, usulan penggunaan anggaran dan penanganan bencana alam dan *review* tematik sebesar 1,5 miliar.

Pelaksanaan evaluasi antara lain berupa evaluasi SAKIP, evaluasi internal, reformasi birokrasi, evaluasi internal usulan zona integritas, WBK dan WBBM, evaluasi efektivitas, penerapan manajemen risiko, dan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP, serta evaluasi implementasi P3DN.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal dan pemantuan lainnya berdasarkan perintah Menteri PUPR dan permintaan unit organisasi senilai 1,8 miliar, pelaksanaan pengawasan lainnya berupa pendampingan pembangunan infrastruktur, sosialisasi bidang pengawasan, koordinasi pengawasan sebesar 2,5 miliar, pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib di tingkat kementerian antara lain *review* keuangan pemerintah, *review* laporan kinerja kementerian, dan *review* usulan perubahan RKBMN sebesar 1 miliar.

Kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan *intern* sebesar 3,35 miliar, pengembangan sumber daya manusia pengawasan Inspektorat Jenderal dalam bentuk diklat, sertifikasi profesional jabatan fungsional, sosialisasi bidang pengawasan dan *workshop* bidang pengawasan sebesar 5,7 miliar, pengadaan sarana internal sebesar 2,5 miliar, penyerangan (*suara kurang jelas*) dukungan pengawasan berupa perencanaan *monitoring* dan administrasi kegiatan pengawasan sebesar 5,5 miliar, pembayaran gaji tunjangan dan operasional lainnya yaitu sebesar 52,18 miliar.

Untuk kegiatan progres Realisasi Anggaran Tahun 2023 sampai status Tanggal 12 Februari 2023, Inspektorat Jenderal sudah merealisasikan sebesar 7,09 miliar atau setara sebesar 7,86% dari rencana 6,02%. Dari realisasi tersebut pencapaian fisik sebesar 8,82% dari rencana 8,75%.

Mungkin Bapak-Ibu sekalian, Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati, dan kami ucapkan terima kasih, bahwa apa yang tadi sudah kami sampaikan, kiranya akan menjadi hal tambahan masukan bagi kami di dalam hal rapat dengar pendapat hari ini terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan pada Tahun Anggaran 2023 ini. Demikian kami sampaikan.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Pak Dirjen Bina Konstruksi, kami persilakan.

DIRJEN BINA KONTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang saya hormati dan kami hormati Pimpinan Komisi V serta Wakil, Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Pertama-tama, izinkan kami dari Direktorat Jenderal Bina Kontruksi untuk menyampaikan paparan yang sesuai dengan ketentuan dalam RDP ini, terkait dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, alokasi anggaran di 2022 adalah kurang lebih Rp646,44 miliar, ini realisasi keuangan dan fisik ada di peringkat keempat dari 10 Unor yang di lingkungan Kementerian PUPR.

Untuk progres keuangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 96,30% di atas PUPR yang 93,67, sementara progres fisik 98,79% dan untuk kegiatan capaian pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Tahun Anggaran 2022, Dirjen Bina Konstruksi dengan target, dengan target 55.630 orang ini bisa direalisasikan menjadi 73.918 orang atau di atas target sebesar 132%, terdiri dari target untuk tenaga kerja konstruksi reguler, tenaga kerja konstruksi IKN dan tenaga kerja konstruksi vokasi.

Di sini untuk tenaga kerja kontruksi *reguler* sebanyak 16.700 orang, ini capaiannya di akhir tahun 2022 adalah 18.308 orang atau 110%, sementara untuk tenaga kerja konstruksi IKN, dari 7.100 orang, capaiannya menjadi 9.796 orang dan TKK vokasi sebanyak 31 orang...31.830 orang, ini capaiannya kurang lebih 45.800 orang atau 144%, capaian untuk tenaga kerja konstruksi reguler ini melebihi target karena adanya *cost sharing* dari organisasi perangkat daerah atau dari dinas OPD terkait.

Kemudian, juga kaitan dengan IKN, ini karena ada *cost sharing* dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terkait dengan pelatihan bangunan gedung hijau dan juga BIM, ini terkait dengan kerja sama perguruan tinggi.

Untuk TKK Vokasi ini melebihi target disebabkan karena ada perubahan dari metode pelaksanaannya yang tadinya secara *offline* menjadi *online*. Sementara untuk sertifikasi kompetensi ini telah dihasilkan kurang lebih 411.402 telah terbit dan telah dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi, ini kumulatif sampai 10 Februari 2023, baik yang dilaksanakan oleh LPJK dalam masa transisi maupun yang dihasilkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi, ini kurang lebih kalau yang dihasilkan LPJK selama masa transisi yaitu dari Januari 2020 hingga 6 Desember 2021 sebanyak 333.318 sertifikat itu terdiri dari untuk yang kompetensi ahli 114.281 orang sertifikat, sementara yang terampil sebanyak 219.038 sertifikat dan juga yang dihasilkan oleh LSP, LSP ini adalah yang setelah masa transisi, ini sudah sebanyak 78.083 sertifikat dengan kompetensi ahli 44.000, sementara untuk teknisi analis, kompetensinya ini ada 19.165 sertifikat dan kompetensi untuk operator sebanyak 14.884 sertifikat.

Terkait dengan sertifikat untuk Perizinan badan usaha, maka sertifikat badan usaha yang sudah terbit ini sebanyak 360.411 sertifikat badan usaha dan sebanyak 92.520 badan usaha yang tersertifikasi, ini dengan rincian yang dilaksanakan oleh LPJK masa transisi yaitu dari Januari 2020 hingga 6 Desember 2022, sebanyak 287.658 sertifikat badan usaha dengan jumlah badan usaha sebanyak 63.964, sementara yang diproses atau yang diterbitkan oleh LSBU, ini sebanyak 72.753 sertifikat badan usaha, terdiri dari 28.558 badan usaha.

Untuk pengaturan Produksi Dalam Negeri (PDN) di Kementerian PUPR ini sesuai dengan amanat regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 3/2014 tentang Perindustrian dan juga Peraturan Pemerintah 29/2018 serta Perpres 16 Tahun 2018. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ini untuk komitmen belanja PDN Tahun 2023 Kementerian PU itu kurang lebih 95% dari Pagu atau sebesar 118,94 triliun. Tindak lanjut untuk pengaturan ini dilakukan *monitoring* untuk tingkat kandungan komponen dalam negeri yaitu pengawasan penggunaan material atau bahan produk melalui, melalui *e-monitoring* dari pu.go.id sendiri, kemudian ini juga menjadi objek pemeriksaan oleh APIP ataupun Itjen, jadi nantinya UNOR baik itu KaSatker PPK akan dilakukan sebagai objek obrik terkait dengan TKDN ataupun PDN ini.

Dari hasil uji petik *review* oleh BPKP, pelaksanaan P3DN di Kementerian PUPR, ini realisasi Belanja PDN hingga 29 Desember 2022 sebesar 104,98 triliun atau 83,32% dari total Pagu Kementerian PUPR yang nilainya kurang lebih 125,98 triliun.

Dalam pengujian terhadap 9 paket dengan nilai 1,11 triliun dan dinyatakan 79,51% valid, sementara sisanya 19,33 tidak valid dan 1,15% *disclaimer*. Belanja produk UMK Koperasi pada Kementerian PUPR, hingga akhir Desember 2022 sebesar 39,1 triliun atau 30,97% dari Pagu Kementerian PUPR. Kementerian PUPR belum...masih belum sepenuhnya melaksanakan Inpres Nomor 2 2022 seperti belum menerapkan kebijakan P3DN dan *roadmap* P3DN dan belum maksimal memberdayakan UMK Koperasi, dari target komitmen Belanja PDN Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yaitu sebesar 138,40% dengan nilai 111,38 triliun dari target belanja PDN yang

semula 80,48 triliun, jadi rekomendasi atau saran BPKP antara lain untuk mempercepat proses penetapan Permen PUPR tentang P3DN, melakukan penyusunan *database supply demand*, MPK Lokal, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun spesifikasi teknis maupun izin impor, melakukan sosialisasi dan Bimtek untuk meningkatkan pemahaman, pemahaman PPK terkait dengan PDN dan TKDN.

Untuk progres pelelangan tender, seleksi Tahun 2023, hingga data status pertengahan Februari, ini kurang lebih dari total paket sebanyak 2.745 paket yang ada di Kementerian PUPR, ini yang sudah terkontrak kurang lebih 12,90% atau 354 paket, sementara yang sedang proses lelang sebanyak 41,29% atau ekuivalen dengan 1.133 paket dengan *breakdown* bahwa yang sudah penetapan sebanyak 111 paket, belum penetapan 733 paket dan sudah berita acara hasil pemilihan itu kurang lebih 289 paket.

Kalau melihat dari proses lelang total Pagu yang tersedia dalam DIPA, ini kurang lebih 38,5 triliun, untuk Pagu pengadaan 76,2 triliun, sementara yang sudah proses lelang kurang lebih Pagunya 34,29 triliun dan yang belum lelang 35,64 triliun, sementara yang sudah terkontrak Rp 4,4 triliun.

Untuk *progres* pelaksanaan tender seleksi paket khusus IKN, di Tahun 2022 hingga 2023 total paket untuk ABCP Unor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan ini kurang lebih 129 paket dengan nilai Rp 28,8 triliun, sudah terkontrak sebanyak 68,99% atau senilai Rp 25 triliun, sementara yang proses tender sebanyak 16 paket, 12,4%, ini proses tender yang sudah penetapan sebanyak 6 paket dengan nilai Rp 1,7 triliun dan belum penetapan ada 10 paket, sementara yang belum tender atau dilaksanakan proses lelang sebanyak 24 paket dengan nilai kurang lebih 1,9 triliun, ini untuk yang belum melaksanakan tender atau seleksi ini, karena belum lengkapnya *readiness criteria* dan juga dokumen-dokumen yang harus mendukung dalam proses lelang.

Untuk keterlibatan penyedia jasa lokal atau provinsi setempat pada paket *single years contract* di Tahun 2022, total pekerjaan konstruksi itu kurang lebih sebanyak 1.062 paket, untuk yang penawaran di atas 80%, total paket sebanyak 699, ini sebanyak 83,55% atau 584 adalah penyedia jasa lokal sementara yang non lokal sebanyak 110, kurang lebih 15,74%. Untuk yang non lokal dengan, dengan Mitra KSO Lokal sebanyak 0,72% atau 5 BOJK, atau penyedia jasa. Sementara, untuk yang penawaran di bawah 80%, ini sebanyak 363 paket, itu yang penyedia jasa lokalnya sebanyak 288 atau sebesar 79,34% dan yang non lokal sebanyak 70 BOJK atau kurang lebih 19,28% sementara yang non lokal dan bermitra dengan KSO lokal sebanyak 1,38% atau 5 penyedia jasa.

Untuk paket putus kontrak, pada paket *single years contract*, pekerjaan konstruksi 2022, ini total pekerjaan konstruksi sebanyak 1.062 paket di mana untuk yang penawaran di atas 80% yang selesai atau tidak putus kontrak sebanyak 673 atau 96,28%, sementara yang putus kontrak sebanyak 3,72% atau 26 penyedia jasa ataupun paket, sementara untuk penawaran yang di bawah 80% dengan populasi total paket 363, ini yang tidak putus kontrak

ataupun selesai sebanyak 353 paket atau 97,25%, yang putus kontrak sebanyak 10 paket kurang lebih 2,75%. Jadi, kurang lebih ini perbandingannya hampir mendekati di bawah 5% yang putus kontrak.

Untuk progres pelaksanaan kontrak pada paket *single years contract* pekerjaan konstruksi 2022 yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sesuai dengan PMK 189/2022 kurang lebih perpanjangan waktu diberikan kesempatan sebanyak 90 hari, ini kalau kita melihat dari populasi paket yang menawar di atas 80% atau total paket 673, ini sebanyak 79,05% atau 532 paket selesai kontrak dan selesai dengan kesempatan yaitu perpanjangan sebanyak 90 hari kurang lebih 62 paket atau 9,21% sisanya ini masih dalam proses pengerjaan atau masih diberikan kesempatan sebanyak 79 paket atau kurang lebih 11,74%.

Untuk yang penawaran di bawah 80%, ini 353 paket, itu rinciannya yang selesai sebanyak 273 atau 77,34%, yang diberikan kesempatan menyelesaikan dengan perpanjangan waktu, itu sebanyak 45 paket atau 12,75%, sisanya ini masih dalam penyelesaian hingga akhir Maret ini.

Untuk rencana kerja di Tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat alokasi Pagu total kurang lebih 567,6 miliar, ini Pagunya turun dibanding kalau di Pagu 2022, di mana untuk dukungan manajemen adalah kurang lebih 513,3 miliar dan untuk pelatihan dan pendidikan advokasi 54,3 miliar itu juga dengan ada *automatic adjustment* atau blokir kurang lebih 10,8 miliar. Program prioritas Dirjen Bina Konstruksi di Tahun 2023 kurang lebih adalah untuk kualitas konstruksi, kemudian integrasi sistem informasi dan pembinaan LSP ataupun LSBU, pembinaan rantai pasok dan PDN.

Kemudian, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta modernisasi pengadaan barang dan jasa. Untuk kualitas konstruksi ini penerapan berbagai standar untuk konstruksi yang berkualitas dengan standar jasa konsultasi serta SMKK, kemudian *monitoring* evaluasi kualitas paket pekerjaan dengan penawaran di bawah 80%, serta akreditasi asosiasi, ini sebanyak kurang lebih 16 asosiasi yang akan dilakukan oleh LPJK, kemudian untuk integrasi sistem informasi dan pembinaan LSP LSBU ini adalah *interoperabilitas*, SIJKT dengan portal perizinan yaitu OSS atau *online single submission*.

Kemudian, pendampingan...pendampingan lisensi dan monev kinerja LSBU dan LSP. Sementara, untuk rantai pasok dan PDN, ini peningkatan registrasi MPK melalui SIMPK dan *Monev* capaian sasaran nilai TKDN, kemudian peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, ini pembaruan SKKNI dan modulnya, kemudian pemenuhan skema untuk sertifikasi serta digitalisasi modul. Kemudian, pelatihan sertifikasi untuk 30.000 tenaga kerja konstruksi serta dukungan penyiapan SDM untuk Ibu Kota Nusantara sebanyak 8.500 tenaga kerja, sementara *modernisasi* PBJ, ini targetnya adalah untuk belanja e-katalog sebanyak 150 jenis produk sektoral PUPR dan target belanja secara elektronik sebesar 3 triliun, serta penerapan sistem informasi PBJ dan penerapan sistem informasi pengalaman simpan dan operasionalisasi untuk IHPS dengan Aplikasi SIPASTI dalam rangka pemenuhan Stranas PK.

Untuk pembinaan tenaga kerja konstruksi 2023, ini target yang dimandatkan kurang lebih 39.156 orang, ini tersebar di 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah di mana untuk Dukman ini kurang lebih 6.522 orang, vokasional yang bekerja sama nantinya dengan SMKK, politeknik, ataupun perguruan tinggi yang terkait dengan tenaga kerja konstruksi nantinya akan dilakukan pelatihan ataupun sertifikasi.

Kemudian, juga untuk yang *tagging* IKN sebanyak 8.500 orang, ini sebarannya kurang lebih seperti ini dan yang mendapat *tagging* IKN adalah hanya empat Balai Jasa Konstruksi wilayah yaitu BJKW Wilayah III, dan BJKW Wilayah IV, BJKW Wilayah V, serta BJKW wilayah VI di Makassar.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak-Ibu yang kami hormati. Demikian yang dapat ini kami akhiri.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Yudha Dirjen Bina Konstruksi. Yang terakhir Kepala BPSDM, Pak Khalawi, kami persilakan.

KEPALA BPSDM KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. KHALAWI AH, M.Sc., M.M., IPU.) :

Terima kasih, pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V, yang saya hormati hadirin sekalian,

Izinkan kami menyampaikan pelaksanaan APBN Tahun 2022 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bahwa sesuai amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020, BPSDM bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi melaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN atau PNS melalui pengembangan talenta, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi lainnya.

Pagu Anggaran BPSDM Tahun 2022 telah mengalami beberapa beberapa kali revisi anggaran dari Pagu alokasi awal sebesar 350 miliar menjadi Pagu terakhir sebesar 347,3 miliar, Pagu terakhir ini sudah merupakan alokasi anggaran yang terblokir ke BA-BUN. Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2022 adalah sebesar 339,7 miliar atau 97,8%, nomor 2 setelah Pak Irjen ini, progresnya paling tinggi Pak Irjen ini. Capaian *output* kegiatan utama Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan talenta meliputi pelaksanaan assesmen dengan capaian 4.315 orang dari target 4.500 orang atau 95,98%,
2. Pemetaan hadir dengan capaian 624 orang dari target 249 orang atau 250% dan pemantauan kinerja dengan capaian 20.735 orang dari target 21.570 orang atau 96,11%,
3. Pelatihan meliputi pelatihan klasikal, non klasikal, Bimtek, dan *workshop* dengan capaian 9.024 orang dari target 5.772 orang atau tercapai 156,34%,
4. Kemudian pendidikan meliputi pendidikan magister super spesialis di 11 Perguruan Tinggi antara lain S1 Teknik Sipil, dan S1 Uncen, D3 PKN STAN dengan capaian 505 orang dari target 369 orang atau 136,85% serta pendidikan vokasi Politeknik PU dengan capaian 635 orang dari target 582 orang atau 109%,

Kemudian, kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022, antara lain:

1. Pelatihan Teknis dan Manajemen PUPR telah dilaksanakan terhadap 9.024 orang meliputi pelatihan bidang SDA 1.340 orang, bidang permukiman 520 orang, bidang jalan dan jembatan 619 orang, bidang perumahan 359 orang, bidang pengembangan infrastruktur 679 orang, bidang manajemen konstruksi 1.690 orang, dan bidang manajemen umum 3.827 orang.
2. Sedangkan, Pelatihan bela negara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, untuk CPNS dilaksanakan dua *batch* kepada 1.055 orang, kemudian pelatihan bela negara juga dilaksanakan untuk para PPK Kasat dan Pokja sebanyak 459 orang, pelatihan dasar CPNS 2022, sebanyak 7 *batch* kepada 1.065 orang, kemudian pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II atau PKN II sebanyak 40 orang, pelatihan teknologi informasi IT, bekerja sama dengan Purwadika *Digital Technology School* ada 70 orang, di Tahun 2022 meliputi pelatihan *data science* 19 orang, UI/UX desain 20 orang, dan *web development* 31 orang.
3. Kemudian, Pelatihan pendampingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gempa Cianjur, kami menyiapkan juga arah, Pak Menteri, sebanyak 408 orang, sekarang di lapangan sudah dikirim 200 orang, kemudian Karyasiswa Magister Super Spesialis Teknik sebanyak 395 orang, jadi kami bekerja sama dengan 4 Perguruan Tinggi Teknis, ITB, kemudian UNDIP, UGM, dan ITS untuk program magister super spesialis, bukan spesialis, tapi di atas spesialis, super spesialis Pak, ini sudah mencapai 390 orang, juga ada untuk non teknis yaitu dengan Unand, UI, Brawijaya, Unhas, dan Binus.

Karyasiswa Non Teknis ini ada 78 orang dengan prodi antara lain adalah Akuntansi sektor publik di Brawijaya, kemudian Akuntansi di Unhas juga sama sektor publik 14 orang, yang tahun ini, 22, kemudian di Unand adalah hukum kontrak konstruksi, kemudian di Binus untuk Teknik Informatika Keamanan Siber, ada 21 orang, dan di UI ada Ilmu Komunikasi *Public Relation* ada 16 orang.

Karyasiswa S1 Teknik Sipil Uncen sebanyak 9 orang, dan Karyasiswa D4 STAN sebanyak 28 orang, sehingga total keseluruhan capaian Karyasiswa mencapai 505 orang. Selain pelaksanaan kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi di dalam negeri sesuai arahan Bapak menteri, BPSDM juga melaksanakan program kerja sama pendidikan melalui LPDP, di mana beliau menargetkan setiap tahun minimal 100 orang untuk bisa mengirim ASN keluar negeri, *alhamdulillah* di Tahun 2022 tercapai 74 orang, biasanya setiap tahun hanya 5-9 orang, untuk tahun ini *insya Allah* kita akan siapkan banyak lagi yang tes kurang lebih 246 orang untuk ikut tes semoga bisa mencapai 100 lebih.

Pelaksanaan pendidikan vokasi di Politeknik Pekerjaan Umum sampai dengan akhir 2022 telah tercapai jumlah mahasiswa politeknik sebanyak 635 orang meliputi, Prodi D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air sebanyak 215 orang, D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan 216 orang, serta D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung 204 orang. Politeknik PU telah meluluskan sebanyak 132 orang mahasiswa pada wisuda perdana di Bulan September dengan rata-rata IPK lebih besar daripada 3 sebanyak 129 orang atau 97% dan 61 orang di antaranya lulus dengan predikat Cumlaude.

Upaya percepatan realisasi anggaran yang dilaksanakan selama tahun 2022 antara lain, mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan *monitoring* dan pengawasan, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran serta mempercepat pemanfaatan potensi *pagu* tidak terserap untuk program prioritas dan mendesak.

Selanjutnya, kami menyampaikan program untuk tahun 2023 untuk bisa dibahas. Bahwa berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PR.0201-Tahun 2023, tanggal 17 Oktober 2022 tentang penyampaian rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga RKA K/L, sesuai alokasi anggaran 2023 Kementerian PUPR Pagu BPSDM Tahun 2023 adalah sebesar 399.738.585.000.

Progres Realisasi Anggaran Tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari sebesar 4,42%. Alokasi DIPA 2023, terdiri dari Pagu program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 89,4 miliar, yang dialokasikan untuk kegiatan Penyelenggaraan Vokasi Politeknik PU, serta program dukungan manajemen sebesar 310.332.054.000 yang sebagian besar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan utama BPSDM seperti pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan talenta yaitu asesmen, pemantauan kinerja dan pemetaan karir, serta dukungan manajemen melalui perkuatan lembaga, reformasi birokrasi, perusahaan penganggaran, monitoring evaluasi kerja sama institusi dalam dan luar negeri serta termasuk belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan.

Prioritas anggaran dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan direktif Bapak Menteri PUPR terkait pengembangan kompetensi SDM, sebagai pendukung terwujudnya reformasi birokrasi antara lain pengembangan talenta meliputi asesmen dengan target 4.500 orang, pemantauan kinerja dengan target 21.560 orang dan pemetaan

karir dengan target 400 orang. Pelatihan dengan target 5.570 orang meliputi pelatihan bidang SDA dengan target 650 orang, bidang permukiman targetnya 400 orang, bidang jalan dan jembatan targetnya 930 orang dan bidang perumahan targetnya 700 orang. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah 400 orang, bidang manajemen konstruksi 580 orang, serta bidang manajemen umum dengan target 1.870 orang. Kemudian, pendidikan magister super spesialis tetap dilaksanakan serta S1 Uncen, kerjasama S1 Uncen dan D3 STAN dengan target 550 orang. Pendidikan vokasi politeknik PU dengan target 732 orang, pembekalan *garasiswa*, *monitoring*, dan evaluasi program LPDP dan lainnya.

Rincian Pagu persatuan kerja di lingkungan BPSDM meliputi, (suara kurang jelas) *udah* lanjut aja, kegiatan BPSDM 2023 meliputi hampir sama dengan 2022 atau pengembangan talenta, pengembangan kompetensi, kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Balai pengembangan kompetensi di wilayah Indonesia serta perawatan lembaga institusi dua manajemen satker, reformasi birokrasi, zona integritas, WBK, dan WBM, perencanaan dan penganggaran, *monitoring* evaluasi serta kerjasama institusi dalam dan luar negeri serta penyelenggaraan pendidikan D3 vokasi Politeknik PU.

Demikian, kami sampaikan, mohon arahan dan masukannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, demikian paparan dari Sekjen, Bapak Dirjen Bina konstruksi, Inspektorat Jenderal dan Kepala BPSDM.

Sekarang pendalaman, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi, kami baru mendapat pemberitahuan, kita Paripurna dan tidak boleh ada rapat lain ketika ada Paripurna. Oleh karenanya, kita dikasih kesempatan *nih* setengah jamlah, paling dari sini kalau gak gerak 10 menit ya. Iya masih ada waktu setengah jam lah, kurang lebih 30 menit, usul *nih*, usul, usul saja kalau ditunda pun *nggak* mungkin karena besok kita ada jadwal rapat penuh, lusa kita udah penutupan masa sidang, ya. Oleh karenanya, kami usul *nih* perwakilan fraksi saja, ya, perwakilan fraksi saja, nanti saya kasih kesempatan, kalau perwakilan Fraksi, 5 kali 10, ya, 5 menit cukup, ya, kalau bisa 3 menit lebih baik.

Saya minta persetujuan ya? Saya mulai dulu dari PDI Perjuangan silakan, Ibu Sri Rahayu dari DPP mewakili Fraksi PDI Perjuangan karena kita ada Paripurna, saya persilakan.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Maaf Pimpinan, baru datang langsung *ditodong*.

Pimpinan yang saya hormati, dan

**Anggota Komisi V, serta Pak Sekjen,
Pak Dirjen,
Pak Irjen,**

Saya baru mendengarkan dua paparan itupun yang satu masih, saya langsung ke Pak Dirjen Bina Konstruksi tadi yang saya beberapa poin mendengar. Yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan adalah langkah-langkah yang terhadap rekanan yang putus kontraknya, apa yang dilakukan *gitu*, selain mungkin kondite ya, selain kondite, karena apapun kalau sudah kontrak kemudian dikerjakan kemudian mungkin termin yang pertama apakah sesuai juga dengan realisasi. kalau tidak bagaimana dan seterusnya, saya mohon informasinya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan kontrak yang oke, yang di atas 80% mungkin kita secara, secara logika itu artinya anggarannya cukup begitu ya, dan tentu dampaknya adalah kualitas, kualitasnya bagus. Lalu yang ingin saya tanyakan yang di bawah 80%, bagaimana dengan perencanaan yang ada, kemudian ada yang di bawah 80, mungkin ini sering ditanyakan, namun ini karena sekarang lagi rapat dengan Bapak, maka saya ingin tanyakan dari sudut *quality* mungkin Irijennya juga bagaimana hasil evaluasinya terhadap kontrak-kontrak yang di bawah 80%, lalu kalau ada hal semacam ini yang disalahkan siapa ini, apakah yang merencanakan atau siapa yang yang tidak, artinya yang tidak benar begitu, apakah memang di dalam aturan saya *nggak tau*, di dalam aturan itu memang ada, *oh* kalau membuat, membuat rencana anggaran *tuh* mesti ada *spelling*-nya sekian persen, apa ada begitu? Kalau menurut saya *nggak* karena yang saya *tau* di dalam perencanaan itu pasti rinci banget *gitu*, rinci sesuai dengan harga. Nah, oleh karena itu, saya mohon penjelasan ini menurut saya penting dan tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya karena ada kaitannya dengan *quality*, kualitas dari bangunan yang ada atau yang dikontrakkan.

Selanjutnya BPSDM, skema sertifikasi Pak, Pak Khalawi, ya, saya ingin tau dengan sertifikasi ini dalam logika pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus karena tenaga-tenaga tersertifikasi kemudian kualitasnya pasti akan meningkat di dalam kinerja karena kualitasnya lebih bagus. Saya ingin minta penjelasan orang-orang yang punya, punya apa...semacam hak begitu ya, untuk melakukan sertifikasi, kenapa, dalam kepala saya jangan sampai seperti yang ada di diri kedokteran, Pak, kedokteran orang sudah lulus, sudah lulus menjadi sudah diwisuda dan seterusnya tetapi *nggak* bisa praktek karena terganjal adanya sertifikasi ini yang dilakukan oleh koligium, ya, kalau di kedokteran, *nah* kalau di sini seperti apa saya mohon penjelasannya, jangan sampai hal itu terjadi.

Kalau hanya sekedar meningkatkan kualitas mungkin, tidak, tetapi kalau ada sesuatu yang memang perlu disertifikasi sehingga dia baru bisa kerja dan seterusnya, yang saya khawatirkan adalah seperti kita punya banyak dokter, kita punya banyak tenaga tetapi *nggak* bisa kerja karena tidak punya sertifikat ini, jangan sampai orang yang melakukan sertifikasi badan ini menghambat begitu, menghambat terjadinya hal tersebut.

Kemudian, saya lanjutkan dengan LPDP, tentu kita semua senang dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini karena akan menyangkut kinerjanya dan hasilnya. Di Tahun 2023 tadi saya melihat data-data, yang pertama yang gagal itu kenapa diusulkan kembali di Tahun 2023? Apa penjelasannya? Maksud saya sudah gagal tetapi kenapa apakah karena kesempatan atau yang lain? Kalau gagal pastikan itu dilihat dari *range* persyaratan secara...secara pendidikannya atau *quality*-nya itu pasti kan di bawah daripada yang yang lain sehingga *kok* diusulkan kembali. Kemudian di Tahun 2023, ini harapannya seperti apa? Sehingga masih ada LPDP, Tahun 2023 cukup banyak juga yang yang ke luar negeri *nih* jumlahnya meskipun dibagi di beberapa dirjen dan irjen, mungkin ada badan juga.

Nah, tahun 2023 arahnya mau ke mana Pak, arahnya, kalau di republik ini secara tenaga-tenaga teknis Indonesia, teknokrat-teknokrat Indonesia ini kayaknya juga *quality*-nya bagus, terbukti kalau kinerja di luar negeri mereka juga sangat bagus sekali *gitu*, lalu yang diharapkan apa *gitu*? Tentu, di orang yang awam tentu harapannya lebih bagus tapi kan ada *reason-reason* yang mendasari itu sehingga Bapak LPDP ini tetap dipertahankan dan jumlahnya juga cukup *gitu* karena di dalam negeri sendiri Bapak, kan sudah punya apa di PUPR kan juga punya sekolah yang...yang apa yang dikelola untuk tenaga-tenaga yang untuk memenuhi dari PUPR maupun masyarakat lainnya.

Saya kira demikian dua itu saja, terima kasih, Pimpinan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih, Bu Sri, lanjut dari Fraksi Golkar siapa? Pak Ali, Ali Mufthi, silakan.

F-P. GOLKAR (DR. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta Bapak-Ibu Anggota,
Yang saya hormati para Pejabat PUPR.**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama kaitanya dengan pengembangan sumber daya manusia, kalau saya baca dalam *paper* yang Bapak sampaikan, yang dipresentasikan di dalam forum yang sangat terhormat ini. Saya punya sebuah keyakinan bahwa, bangsa kita mempunyai harapan yang besar untuk lebih cepat majunya. Saya juga bisa bayangkan itu bagaimana insan-insan Indonesia yang mempunyai kualifikasi yang begitu hebatnya, sampai ada super spesialis ini, sudah spesialis juga ditambah super *gitu ya, nah*, nanti ditambah lagi Pak, ditambahi *power*, jadi super *power* spesialis, iya itu akan luar biasa.

Namun, Bapak sekalian saya hormati, saya punya catatan begini, Bapak punya *ndak* dengan sumber daya manusia yang begitu hebatnya itu, itu bisa

mengukur kinerja dari masing-masing insan PUPR yang Bapak kembangkan. Misal yang super spesialis itu mereka bisa mengerjakan satu jam itu berapa *output* yang bisa dihasilkan? Misal 8 jam, itu mereka bisa menyelesaikan beberapa *item* yang dibutuhkan oleh negara kita ini. *Nah, problem* sumber daya manusia kita, Bapak sekalian, yang saya hormati, itu adalah bagaimana akselerasi kerja ini yang menjadi belum bisa diukur secara baik, sehingga kadang-kadang kita menemukan *wong-wong* pintar, orang-orang hebat tetapi *kok nggak* begitu bisa cepat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya di sebuah profesi itu. Kalau kita melihat SDM kita di masing-masing negara apa kementerian maupun di kampus-kampus itu, kita sudah luar biasa, tapi jangan-jangan mereka hanya pada wilayah kognisi, Pak. Mereka eksklasi intelektual, kecerdasan intelektual yang luar biasa tapi afeksi dan psikomotoriknya belum bisa kita ukur, kedisiplinannya, kecepatannya dia menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu satu yang artinya harus, yang perlu di apa...diakselerasikan di dalam konteks kepentingan negara kita.

Berikutnya kaitanya dengan masalah irjen, Bapak-Ibu sekalian, saya sungguh bangga dengan kinerja yang Bapak sampaikan dengan capaian-capaian yang begitu baik. Ada persoalan Pak, apakah punya koneksi dengan persoalan yang lain, Pak, kalau irjennya menghasilkan sebuah produk yang baik, seharusnya yang diawasi juga baik, iya, saya ulangi lagi kalau produk pekerjaan inspektorat itu baik maka *output*-nya menjadi baik, persoalannya adalah Bapak-Ibu sekalian, saya ini sejak dulu itu kadang-kadang mikir kenapa *kok* pengaspalan jalan kita ini tidak pernah selesai, dibangun tahun ini, tahun depan rusak, dan itu seperti terus seperti itu, Pak, dan saya pikir, saya pingin ada satu koneksi yang cukup bisa merepresentasi dari cara berpikir kita bahwa pengawasan yang baik akan menghasilkan sebuah *output* yang baik, baik *output* maupun *outcome*-nya itu baik tapi kalau hanya pengawasan dengan skor sekian 97%, *nah*, ini, ini, ini kadang-kadang yang perlu kita *review* Pak, ya, yang perlu kita *review* Pak.

Yang ketiga, Pak Sekjen, saya cukup bangga bahwa Pak Sekjen ini cukup dapat penghargaan yang luar biasa, *buanyak* sekali penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, saya *acungi* jempol dua Pak, jempol dua Bapak ini, luar biasa. *Lah* saya selalu berpikir karena kami adalah saya wakil rakyat Pak, penghargaan yang luar biasa itu implikasinya buat rakyat saya, masyarakat saya Pak, ini ya harus dikoneksikan Pak, *oke gitu*, Pak ya, iya itu *aja* sebenarnya, Pak.

Yang terakhir, kepada Bina Konstruksi Pak, pelatihan tukang iya jangan satu Pak, ini yang perlu Pak Pimpinan, masa kemarin dua, sekarang tinggal satu, ya kami usulkan minimal sama Pak, dengan yang itu.

Yang terakhir, Pak, katanya ada masalah lelang Pak, sejak dulu saya kadang-kadang mengkritisi Pak, kenapa lelang itu selalu dimenangkan mereka yang dengan nilai penawaran yang rendah, tapi ada putus kontrak, ada yang dibawa lari, ada yang...artinya *nggak* selesai terus minggat *gitu* ya dan sebagainya dan sebagainya, Pak. Apakah tidak ada cara berpikir lain, Pak, pola pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, iya pendekatannya, pendekatan kualitatif bukan pendekatan murah.

Kadang-kadang kita ini, Ibu Bapak sekalian, rekanan itu yang kalau kita lihat itu infrastrukturnya itu juga kadang-kadang pinjam sana pinjam sini, mereka kadang-kadang belum juga utuh, lah, bisa *ndak* kita ngasih cara berpikir paradigma Bapak sekalian, bahwa lelang itu kalau perspektifnya kualitatif, maka kalau dia bisa menjelaskan secara linier cara berpikir kualitatif itu, maka itulah yang memenuhi syarat untuk dimenangkan. *Lah*, kualitatif itu bisa kita kuantitatifkan Pak, sekalian, bisa kita kuantitatifkan dengan angka-angka, ya, kalau kita ini diskusi lebih detail, saya bisa kasih cara berpikirnya, Pak.

Saya pikir itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.

Akhirul kalam.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Waalaikumsalam.

Terima kasih. Maaf ini waktunya sudah sangat pendek *nih*, setengah jam lagi, Pak Gerindra silakan, Pak, dari Gerindra siapa? Pak Sudewo, silakan.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.) :

Terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja, saya awali dengan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) di Kementerian PUPR itu dalam posisi yang sangat penting dan sangat strategis. Kementerian PUPR, kinerjanya akan bagus baik dilihat dari *output* maupun *outcome*, itu bila sumber daya manusianya unggul, bila sumber daya manusianya tinggi, kalau SDM-nya tidak unggul tidak mungkin kinerjanya bagus. Kalau kita lihat selama ini kinerja Kementerian PUPR secara umum itu bagus secara umum, tetapi kalau kita cek secara mendalam banyak sekali persoalan di sana, baik di perencanaan, baik di tender maupun di pelaksanaan, maupun di tingkat pengawasan oleh inspektorat jenderal sendiri, lalu kita di Komisi V tentu *tau* tapi bagi orang awam masyarakat secara umum, itu menilainya bagus.

Saya tidak bisa menilai sejauhmana sumber daya manusia Kementerian PUPR ini bagus, ada dua ukuran yang harus ditangani oleh Kepala BPSDM: yang pertama adalah kuantitas, yang kedua adalah kualitas. Kalau BPSDM tidak memaparkan berapa jumlah masing-masing personil di tiap-tiap unit, itu kami tidak akan bisa *tau* dan berapa sesungguhnya personil yang dibutuhkan secara ideal untuk melakukan kerja dan kinerja Kementerian PUPR, misalnya di bidang perencanaan, perencanaan di masing-masing direktorat itu sekarang adanya berapa, kemudian idealnya harus berapa di bidang pelaksanaan, kemudian di bidang pengawasan, kemudian di sekretariat. Itu idealnya berapa, sekarang ada dan kalau memang itu kurang, kurang berapa, kalau jumlahnya lebih, lebihnya berapa, secara proporsional harus bagaimana. Jadi, dari awal sampai sekarang tidak pernah ada penjelasan tentang kuantitas.

Kemudian bagaimana dari sisi kualitas di masing-masing unit itu, ya, itu perlu ada penjelasan juga, kualitas yang mendukung kerja dan kinerja Kementerian PUPR itu, kualitas yang diharapkan seperti apa. Inikan perlu ada satu pemetaan, ya, bahwa kualitas di perencanaan adalah demikian kriterianya, di bidang pelaksanaan Satker sampai PPK, demikian kriterianya. Punya latar belakang, harus bagaimana, pendidikan formal, pengalaman harus bagaimana, semua kriteria itu harus ada.

Jadi, saya hanya ingin fokus bagaimana BPSDM itu bisa menampilkan dari sisi kuantitas dan sisi kualitas. Dari sini saya akan lihat bahwa sumber daya manusia di Kementerian PUPR itu sudah memadai, ini tidak hanya dalam ruang lingkup lembaga atau kementerian, di Kementerian PUPR. Dalam konteks bangsa dan negara, negara tidak akan maju kalau sumber daya manusia masyarakatnya tidak unggul, kalau sumber daya manusia masyarakatnya tidak punya nilai saing dengan negara-negara yang lain, ya, contohnya kita sekarang ini sumber daya alam melimpah tetapi kita masih dalam taraf prasejahtera atau sejahtera bahkan menjadi tenaga kasar di negara lain. Itu merupakan proses pembelajaran meskipun sekarang presiden kita Pak Jokowi sudah banyak melakukan upaya untuk peningkatan sumber daya manusia, saya ingin mendapatkan penjelasan dari BPSDM.

Kemudian yang kedua, kepada Bina Konstruksi, Bina Konstruksi ini secara umum harus melakukan satu evaluasi, introspeksi itu penting. Kalau kita lihat sebagaimana yang dipaparkan oleh Dirjen Bina Konstruksi, penawaran dikategorikan ada dua, di atas 80% dan di bawah 80%, pertanyaannya mengapa dikategorikan di atas 80%, dan mengapa dikategorikan di bawah 80%, di atas 80% tapi kalau masih di bawah 90% pun itu kategori tidak bagus ya, mengapa tidak ada kategori di atas 90% yang super bagus, karena yang 80% ke atas itu pun di antara 80% sampai 90% itu sebenarnya tidak dalam kondisi bagus.

Yang memprihatinkan lagi, ada penawaran di bawah 80% dan itu jumlahnya sebesar 33% yaitu sebanyak 353 dari 1.060 begitu, ini kan sangat signifikan jumlah yang semacam ini. Ini baru dilihat dari sisi nilai penawaran, dilihat dari sisi nilai kontrak barangkali tetapi bagaimana implementasi di lapangan dengan penawaran yang sebesar ini, ini kan memprihatinkan. Jadi, lagi-lagi yang dikorbankan adalah kualitas pekerjaan, tidak akan mungkin kualitas pekerjaan menjadi bagus kalau kontraknya di bawah 80%, kalau penawarannya di 80 di bawah 80%.

Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Ya, ini menjadi tantangan bagi Bina Konstruksi, jangan sampai dari tahun ke tahun seperti ini kondisinya. Kalau di bawah 80% pun, berapapun nilai kontraknya nanti di bawah 80% tapi pada realitanya bisa dilaksanakan di lapangan dan katanya...dan katanya dari Inspektorat Jenderal maupun dari Sekjen maupun dari instrumen yang lain ini pun hasil pekerjaannya bagus, berarti ada sesuatu yang salah *dong*, di bawah 80% pun katanya pekerjaannya bagus karena tidak ada *problem*. Kalau kita lihat nanti bagaimana jasa pelayanan konstruksi itu satu tahun atau dua tahun kemudian itu rusak, itu merupakan satu tolok ukur tapi sampai dengan sekarang ini kan katanya semuanya bagus, kalau memang semuanya bagus

berarti ada sesuatu yang salah, yang salah di mana? Di perencanaan, kalau salah di perencanaan berarti ada pemborosan di anggaran. Ini kan lagi-lagi kembali kepada kaitannya dengan BPSDM, Sumber Daya Manusia. Jadi, satu dengan yang lainnya itu terjadi, saya akan fokus satu itu aja di Bina Konstruksi, ini merupakan satu tantangan, sebenarnya saya banyak menyiapkan pertanyaan di Bina Konstruksi, tapi karena waktunya terbatas, saya lanjut kepada Sekjen.

Sekjen itu kan punya banyak biro, biro-biro ini merupakan satu akumulasi atau kanal atau saluran dari masing-masing bagian, di masing-masing direktorat, ya, bagaimana bahwa setiap kegiatan di direktorat itu terkoordinir dengan bagus di Sekretariat Jenderal yaitu di biro-biro maupun di pusat lembaganya. Saya ingin tanya Pak, koordinasi perencanaan di direktorat baik Direktorat Bina Marga, Cipta Karya, Air, Perumahan dan yang lain, itu bagaimana sistem koordinasinya dengan Biro Perencanaan di Sekretariat Jenderal, apakah menerima begitu saja apa yang direncanakan oleh direktorat atau melakukan satu evaluasi sifatnya sinkronisasi atau melakukan evaluasi karena dilihat banyak sekali perencanaan di direktorat-direktorat itu yang memang perlu dibenahi dengan kita melihat ukurannya adalah kontrak dan hasil pekerjaan.

Saya ingin lanjut ke Sekjen, implementasi Inpres bagaimana Pak, perkembangan Inpres, saya melalui Sekjen sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri, bahwa Pak Menteri telah berupaya maksimal dan itu konkret meng-*clear*-kan persoalan Inpres ini dengan Bappenas tapi belum sampai titik akhir dan saya yakin Pak Menteri juga tidak berhenti di situ. *Nah*, secara paralel, secara paralel kalau Inpres ini nanti *clear* apa yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang, jangan sampai Inpres *clear*, waktu yang tersisa di Tahun Anggaran 2023 ini sedikit sehingga tidak punya cukup waktu untuk mengimplementasikan, secara paralel apa yang harus dilakukan.

Kemudian, saya ingin selanjutnya kepada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal pengawasan adalah terhadap dua unsur yaitu perencanaan dan realisasi pelaksanaan. Sebenarnya ada satu hal, Pak, satu tahapan yang sangat penting dan strategis dan berpengaruh terhadap berbagai hal yaitu tahapan *tender*, ya. Jadi, ini tampaknya Inspektorat Jenderal kurang fokus juga terhadap pelaksanaan. Ini saya berpedoman terhadap pemaparan inspektur jenderal *loh*, bukan karena asumsi saya *loh* karena ini pemaparan inspektorat jenderal bahwa Inspektorat Jenderal fokus terhadap pengawasan yaitu pelaksanaan dan pelaksanaan sementara ada tender, saya hanya ingin memberikan masukan supaya tender itu penting.

Kemudian, dalam pengawasan di perencanaan, temuan apa saja yang Bapak yang Bapak *nganu* temukan, *gitu* ya, kemudian di pelaksanaan apa saja yang ditemukan, dinamika pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu sangat besar Pak, sangat banyak, banyak sekali *gitu* ya, yang tidak perlu kami ulang secara detail tapi di situ pekerjaan itu sangat...seperti di tempat saya saja kayak jembatan gantung, ditinggal begitu saja itu pekerjaan kecil, belum kerjaan besar, ya. Misalnya satu pekerjaan juga ya tidak selesai-selesai ya, hanya

seharusnya, seharusnya misalnya dengan membangun jembatan itu 100 tenaga kerja, yang bekerja hanya 40, hanya 50, ini kan juga. Kira-kira hal yang semacam ini menjadi temuan atau tidak, karena pekerjaan konstruksi itu merupakan wujud peradaban suatu bangsa, kalau kita melaksanakan pekerjaan konstruksi yang terlalu lama, tidak dengan teknologi dan dengan sumber daya manusia yang unggul, ini menjadi satu kesalahan juga.

Yang ingin saya fokuskan terhadap hal ini adalah produk dalam negeri Pak, bagaimana Bapak bisa *tau* bahwa seluruh pelaksana di lapangan ini produk dalam negerinya sudah bisa terlaksana dengan baik, TKDN-nya itu, itu terpenuhi dan coba adakan satu kajian Pak, dengan TKDN yang terpenuhi itu dari sisi kualitas bagaimana ya, dan dari sisi harga bagaimana, ini hanya cukup untuk memperbandingkan bagaimana dengan produk luar negeri yang harus kita pilih kalau memang kita punya target produk dalam negeri itu TKDN-nya sebesar 40% misalnya, PDN-nya itu misalnya sampai harus 95% itu bagus sekali tapi jangan sampai mengorbankan kualitas dan kualitas ini kaitannya dengan kualitas konstruksi, tolong diberikan satu kajian, terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Dewo dengan berat hati, sebenarnya, Mas Dewo, itu baru 10%, nanti kita lanjut lagi, Mas, masih ada waktu berikutnya. Dari Nasdem silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, Nasdem saya ya? Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Teman-teman mitra dari PUPR yang saya hormati,
LPJK dan seluruh jajaran yang hadir,**

Yang pertama, saya kira kita semua hampir sama, apa yang disampaikan Pak Dewo, Bu Sri semuanya dan ini berulang kali kami sampaikan, terutama bagaimana kita untuk memperbaiki tentang apa yang selalu kami sampaikan masalah tender-tender yang dilakukan di daerah, ya, dan itu yang kita fokus karena hasilnya itu kualitas pembangunan kita menurun jauh, ya. Saya melihat sendiri apa yang terjadi di Dapil saya dan ini yang perlu saya minta Pak Inspektur Jenderal, tolong jawab kami semua dan apa solusinya untuk kasus-kasus seperti ini, ya, karena menurut kami kalau kami rapat tiap sekali cuma bicara dengar, terus pulang, *action*-nya tidak ada, tidak ada usaha perbaikan ke depan seperti apa, ya percuma saja kita rapat tiap kali seperti ini ya.

Begitupun, dari Dirjen Bina Konstruksi, jangan memakai *motto* bahwa yang terendah yang menang, kualitas...kualitas daripada pembangunan kita ini saya sampaikan, sayang, Pak Jokowi begitu bergebu-gebu untuk bagaimana

infrastruktur kita ini dibangun dengan uang yang begitu banyak tetapi hasilnya, kualitasnya ini tidak membanggakan kita, ya.

Untuk itu, saya minta kepada teman-teman LPJK, LPJK hadir? *Nah*, tolong harus ada perbaikan, iya kan, kami desak selalu kepada mitra kami yang ada di sini, selalu disampaikan kendalanya ada di LPJK, yang akan nanti protes ini dan itu. Tolong, Pak, harus ada perbaikan, ya, kalau cuma prosesnya itu di dalam laptop dan kertas-kertas itu, itulah hasilnya, ya, hasilnya seperti itu. Saya sampaikan berapa kali di sini, di daerah saya, lima, tender di Tahun 2022 dan ini saya minta Pak Dirjen lagi, yang harus sudah PK ini tidak dibiarkan terus dan sekarang masih dilakukan juga, itu tender bulan Maret apa April *gitu* 2022 dan masih dikerjakan, harusnya sudah selesai, ya kan. Sekian lama, tapi saya tidak *tau* kalau ini mungkin ada apa pemborong ini, apa pemenang ini, maka ada dispensasi khusus, diskresi khusus untuk dibiarkan terus, ya itu, ya, kalau seperti itu, iya kan, akhirnya semangatnya itu yang penting selesai, hasilnya usulan nanti, kualitasnya nanti, dia, tapi yang penting selesai, iya kan, anggaran sekian, bisa bekerja berapa dulu, *deh*, nanti besok tender lagi, ini kan *nggak* benar ini, ya kan.

Tolong, ya kan, ini uang, uang rakyat dan kita pakai untuk membangun untuk kepentingan rakyat, tolong jangan *dimain-maininlah*, iya kan, saya minta Pimpinan, rapat kita ini penting sekali. Kita kebentur dengan waktu Paripurna, terus jangan kita berhentilah kalau bisa, kita skors aja dulu dan kita harus melakukan pendalaman betul-betul supaya harus ada kesepakatan di sini bagaimana untuk menyelesaikan itu, harus ada dia di dalam pendapat akhir rapat kita ini, ya kan, karena kalau tidak ini percuma kita rapat seperti ini terus, ya kan, teman-teman datang *cuma* dengar, ya, ya, ya tapi tidak ada *action* karena tidak ada keputusan kesepakatan yang mengikat kita.

Nah, saya harapkan itu, dari Dirjen seperti apa *action* nya ke depan dengan kasus-kasus seperti ini, dari Bina Konstruksi seperti apa *gitu*, iya kan, dari LPJK, tolong saya minta agar ini betul-betul ada satu kesepakatan kita untuk bisa ada perubahan, solusinya itu, bukan kita cuma bicara kasus, kasus, kasus tidak ada solusinya, iya kan, kasihan pengusaha-pengusaha daerah yang selama ini, ya kan, jadi penonton di daerahnya semuanya, kalau itu hasilnya betul-betul baik, saya kira mungkin *oke*, tapi hasilnya seperti itu kami sebagai bagi Anggota Dewan datang ke daerah kami, iya kan, kami dicemooh sama mereka, inilah, Anggota Dewan lihat hasilnya seperti ini, apa Bapak-Bapak sebagai Anggota Dewan melihat seperti ini, apa cuma lihat seperti itu, selesai datang sampaikan habis di situ, tidak, harus ada suatu kesepakatan menurut saya, Pimpinan, yang mengikat kita di pendapat akhir kita, RDP. Karena itu menjadi pegangan kita ke depan, ya, kami selalu sudah sampaikan ini, ya kan, Dirjen Bina Kontruksi ya itu, bahwa ini ada ketentuan yang dipakai, ketentuan itu yang buat manusia, kalau itu tidak benar, kan selalu harus ditinjau kembali, ya kan, harus ada perbaikan untuk semua perbaikan ke depan.

Iya jadi, Pimpinan, saya mohon sekali lagi kita karena kita mau Paripurna Jam setengah satu, ini waktu tinggal sebentar saja, iya kalau kita rapat ini masih ada banyak teman-teman yang belum, saya kira bila perlu kita skors aja nanti jam rapat tidak lama *kok*, paling jam setengah 3, jam 3 itu sudah

selesai dan bisa lanjut untuk mengikat kita semua agar betul-betul ini, kita rapat ini karena teman-teman di daerah saya sampaikan, kita rapat ini mereka sangat pengusaha apa mengharapkan agar DPR bisa buat satu perubahan untuk perbaikan ke depan dan Pimpinan, kita sepakat kemarin itu sudah ada satu kesepakatan untuk di rapat internal nanti kita memutuskan, untuk kita panjakan apa tidaknya soal khusus, ya, untuk ini, pengadaan-pengadaan atau kontrak-kontrak yang banyak bermasalah ini.

Saya kira itu, Pimpinan, yang kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf pada teman-teman semua, atas mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu sekalian, waktu tinggal lima menit, kita *nggak* boleh *nabrak* paripurna sesuai dengan tata tertib, mungkin saya rasa persoalan kalau saya dengar dari itu yang pertama, kedua, ketiga masalahnya sama, soal kinerja bina konstruksi, akuntabel, apa nama transparansi akuntabilitas, *reward and punishment* di internal PU, ini sudah berjalan baik atau belum. Tadi, Pak Hamka dengan Pak Robert bicara soal panja, *nah*, kalau bicara soal panja nanti kita *ngobrol* dulu, rapat internal. Pimpinan, kebetulan juga mau minta waktu *nih*, rapat internal terkait jalan daerah, iya, karena besok kita sidang terakhir, lusa kita udah penutupan masa sidang, nanti teman-teman kehilangan informasi.

Saran saya, ini saya rasa walaupun saya disuruh *ngomong* yang saya *soroti* juga apa yang tadi Pak Robert sampaikan. Tadi, saya sebelum masuk berdiskusi lama dengan Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Robert, kasus Bapak sama saya tempo hari, *gitu loh*, ini saya sama Pak Robert ini ada kasus ini, *nah*, Bina Konstruksi, tempo hari kita coba luruskan, *eh* saya udah sampaikan dengan Pak Sekjen juga tahu *case nya* ini, ya itu *loh*. Jadi, harusnya *mencopot* orang, *reward and punishment* itu dari *gini* itu harusnya standarnya jelas, Pak, karena kalau standarnya *nggak* jelas jadi *dzolim*. Kemudian, kalau orang-orang tertentu, udahlah itu orang terdekat Pak Sekjen *nggak usah* dihukum, orang dekat Pak Irjen *nggak* usah dihukum, orang dekat Pak Dirjen *ndak* usah di hukum atau orang dekatnya Pak Menteri misalnya ada bahasa begitu, ya, udah *nggak* usah ditindak.

Pertanyaan saya Pak Irjen, masih berlaku *nggak* itu di lingkungan Menteri PUPR? Ini pertanyaan yang tidak mudah. Saya kalau tanya juga sama, masih ada *nggak* soal teman atau bukan di lingkungan Kementerian PUPR? Iya, masih ada *nggak* istilahnya sultan atau rakyat jelata di Kementerian Perhubungan? Apa di Kementerian PUPR? Sultan itu *nggak* bisa disentuh *gitu loh*, Pak. *Nah*, kalau rakyat jelata ya sudah, *lo* bikin salah, *gua* sikat aja, walaupun *nggak* ada salah, iya sudah karena *gua* mau ganti, ya, *gua* punya mau naik, *gua* ganti aja. Hanya Tuhan dan Bapak-Bapak yang *tau*, iya kami *ndak tau*, Pak.

Itulah diskusi semua sama ini, lelang juga sama, kalau lelang ini, kenapa orang lokal yang punya alat, punya material *nggak* bisa kerja, kemudian kita paksakan ini *nggak* jelas datang dari mana, terus menang, *ngutangin* orang

lokal, yang ada orang lokal di situ kerjanya *nggak* dibayar, materialnya *nggak* dibayar, tenaganya *nggak* dibayar. Pertanyaan saya, masih ada *ndak* kasus seperti ini teman-teman sekalian? *Nah*, yang *ngomong* kawan-kawan, masih ada. *Nah*, kalau kita bicara kinerja, siapa yang harus membereskan ini, masa DPR? Iya, PU *dong* yang harus bereskan.

Saya buka halaman satu saja, Pak sekjen, halaman dua sampai penutup Bapak yang bereskan, nanti kalau saya terlalu banyak, orang kalau terlalu banyak *tau*, kalau *ngomong* itu capek Pak, *ndengarnya* karena dia terlalu banyak *tau* dan saya ini terlalu banyak *tau* masalahnya.

Jadi, saya rasa sampai di situ saja teman-teman sekalian, kita mau rapat internal masalah jalan daerah, ya, ini soal tapi saya *nggak* bisa buka semua, saran saya rapat ini, Pak, pasti ujung ceritanya sama dengan saya bicara tadi sama Pak Robert itu. Pak Robert masih *ngupas* soal itu juga, saya ini, Pak, coba benarkan jalur di tempat Pak Robert *nih*, *aduh* sampai hari ini akhirnya makan korban, Pak. Jadi, ya, sudahlah kalau menurut saya Pak Robert, ini aku mohon izin, ini saya kompromi sama Pak Ridwan juga, kita perpanjang sampai subuh besok bahwa permasalahan ini *nggak* selesai, Pak.

Menurut saya, Pak Hamka ini menurut saya, kita bahas dulu yang tadi jalan daerah habis ini internal, kita gunakan waktu paling *nggak* 3-5 menit, habis itu, ini rapat ini kita tutup saja. Persoalan itu *aja* kita minta diuraikan dengan kita di jawaban tertulis, apa yang Pak Robert sampaikan tadi dan saya tadi disampaikan dan Pak Dewo tadi disampaikan, Bu Neng Eem tadi sampaikan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Belum saya.

KETUA RAPAT:

Nggak, tapi sama kan titiknya sama ini, kalau yang lain-lain udahlah, kalau soal program dan segala macam kan sudah jelas, kita *nggak* usah *ngomong* lagi di sini soal program. Iya nanti karena waktu kita singkat, Pak, kita *nggak* punya waktu lagi selain sekarang, nanti saya kumpulkan kita semua bidang tersebut

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Interupsi, Pimpinan, sebelum ditutup.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Iya terima kasih, Pimpinan.

Langsung saja dari Tahun 2019, Ketua, yang kita bicarakan akhirnya adalah di Bina Konstruksi, yang jadi pertanyaan saya kualitas pertemuan kita ini seperti apa *gitu*, *kok* tidak ada perubahan jawaban dari kementerian berkaitan dengan masalah jasa konstruksi ini. Jadi, kalaulah apapun yang *diomongkan* Ketua, *diomongkan* Wakil Ketua, *diomongkan* Pak Dewo hanya kita dengar saja bersama di sini tanpa ada keputusan, menurut saya iya *nggak* ada kualitas pertemuan kita ini, *nggak* tercapai apa yang diinginkan oleh undang-undang ada kemitraan dalam rangka untuk membangun bangsa ini.

Apa yang kita sampaikan ini adalah hasil dari reses kita di setiap daerah berkaitan dengan masalah Bina Konstruksi ini, jadi maksud saya tidak cukup banyak kita terima-terima begitu saja apapun yang menjadi alasan PUPR, tetapi harus ada perubahan sesuai dengan keinginan masyarakat yang sebenarnya kita *tau* di lapangan seperti itu, kan ini kan fleksibel saja, kenapa harus takut? Kenapa harus di bawah 20% harus dimenangkan kemudian di atas sana *nggak* boleh begitu, di sinikan kebijakan dari Pak Dirjen harus ke bawah itu jelas *gitu*. *Nggak* masalah walaupun mereka hanya buang 5% dimenangkan, kenapa harus takut? Yang dipermasalahkan kenapa yang harus buang yang paling banyak harus dimenangkan itu, *gitu* saja dan ini harus keputusan ada keputusan Ketua, harus ada keputusan, walaupun harus ada rapat khusus, iya mau tidak mau harus dilakukan karena percuma juga kita di dalam sini, sudah hampir lima tahun, berbicara itu permasalahannya tetapi tidak ada keputusan, *nggak* ada manfaatnya apa yang kita sampaikan.

Saya pikir itu, Ketua, terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, ini sudah *nabrak* jam Paripurna, saya tampilkan saja.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Pimpinan, interupsi. Tadi kan kita per fraksi, *nah*, kita belum dapat nih PKB ini per fraksi.

KETUA RAPAT:

Iya makanya Bu, Ibu *nabrak* juga, ini udah masuk di jam, udah *ngelanggar* tatib juga kita. Saya sebenarnya sudah kasih pengertian, harusnya tadi 10 fraksi cukup, Bu, kan 5 menit, 5 menit, cukuplah harusnya tadi. Ini *monggo aja*, ini udah tatib *nih* *nggak* boleh kita rapat di jam yang sudah diatur oleh Paripurna, itu bunyi tata tertib.

Saya mohon pengertian *nih* dari kita semua.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Kalau begitu izin ditunda, dilanjut nanti selesai Rapat Paripurna.

KETUA RAPAT:

Iya saya minta, iya ambil minta pendapat kita semua. Kalau Ibu mau *ngomong*, semua mau *ngomong*, kita masuk, masuk Paripurna kan? Betul *nggak* Bu?

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Iya jadi ditunda, ikut Paripurna dulu, setelah Paripurna kita lanjut.

KETUA RAPAT:

Ini *nggak tau*, Komisi V ini ada yang di Bamus *nggak*? Harusnya disuarakan ini kita ada rapat hari ini di Bamus, *nah....*

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS) :

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya *gimana*, Pak Hamka? Jalan keluar *nih*.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS) :

Kita tutup saja baru kita lanjut rapat khusus untuk agenda sama dengan beberapa waktu yang lalu, jadi walaupun nanti setelah *ndak* masalah. Saya kira itu jalan keluarnya karena belum tuntas, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saran saya begitu tadi, Pak.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Izin interupsi Ketua, kalau saya tidak setuju, kalau ditutup.

KETUA RAPAT:

Iya sudah Ibu *ngomong* dulu, silakan, saya kasih kesempatan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Saya *nggak* setuju kalau ditutup, tetapi ditunda.

KETUA RAPAT:

Iya maka saya kasih kesempatan Ibu bicara, saya persilakan.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.) :

Oke terima kasih, pimpinan.

Pertama untuk BPSDM ya, yang untuk politeknik itu, Pak, untuk bisa masuk ke sana itu seperti apa apakah masyarakat umum bisa, *nah*, saya berharap saya ini dari rapat ke rapat selalu saya sampaikan agar Putra-Putri Indonesia yang ada di daerah-daerah terutama di Dapil kita yang memang punya berkeinginan di sana itu bisa diakomodir, minimal per-Dapil itu kita dikasih kuota, itu yang pertama, itu adalah bentuk salah satu bahwa kita bersinergi.

Kedua, untuk Irjen dan Bina Konstruksi, hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi *gitu* kan, bahwa saya tidak mau di tahun 2023 terjadi lagi program yang kita bawa, yang kita usulkan kemudian pemenangnya itu ada tanpa sepengetahuan kita tetapi kemudian meninggalkan masalah konflik sosial dan lain sebagainya, ini juga terjadi di tahun ini *gitu* kan seperti itu. Saya berharap untuk ke depan karena besok itu ada tahun politik, kita tidak mau terganggu dengan hal-hal yang seperti itu.

Oleh karena itu, untuk pemenang-pemenang program terutama program yang kita bawa ke Dapil mohon dikoordinasikan dan prioritaskan adalah pengusaha lokal seperti itu yang kita itu kan paham, mana yang mampu menyelesaikan, mana yang tidak, kalau memang sudah tidak ada barulah silakan pengusaha nasional dan lain sebagainya, itu.

Saya kira ini, ini ini tolong harus ada keputusan bersama, tidak, tidak serta-merta hanya kemudian disampaikan di rapat, didengar dicatat terus memberikan jawaban itu selesai, harus ada eksekusinya, penyelesaiannya.

Itu saja terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya tadi kasih usul, kita bahas di khusus, *nggak* bisa juga didalami sekarang, terus kalau kita putusin sekarang, mau *ngapain* Bapak-Bapak ini, kasih kesempatan juga kan, suruh benahi juga kan, perbaiki juga kan, sama aja. Cuman kan, maksud saya kita *ngambil* di ruang yang *nggak* buru-buru begini, ini buru-buru bukan salah kita. Kita bikin jadwal ini Bapak-Ibu sekalian jauh sebelum Paripurna ini keluar, *gitu loh*. Saya juga *nggak* mau rapat, ini kebetulan giliran saya yang Pimpin ini, di tengah jalan ada rapat, kita Paripurna.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T.,M.T.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan, ditutup saja sudah setuju saya udah.

KETUA RAPAT:

Nah, itu dia makanya, Pak, jadi kita lanjutkan nanti di rapat berikutnya kita dalam lagi seperti yang tadi Pak Hamka sampaikan. Saya setuju nanti Pak

Robert, kita...PR kita saya paham betul Pak nanti kita dalam di sana supaya kita bisa rapat internal dulu, di internal kita terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Sekarang mohon izin tampilkan kesimpulan rapat dulu silakan.

Baik

Kesimpulan Rapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa, 14 Februari 2023

1. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR dalam APBN Tahun 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
 1. Sekretariat Jenderal Keuangan 97,29% dan fisiknya 99,82%.
 2. Inspektorat Jenderal 99,22%, fisiknya 99,74%.
 3. Dirjen Bina Konstruksi 96,30%, fisik 98,79%.
 4. BPSDM 90, realisasi keuangan 97,80% dan realisasi fisiknya 100%
 - b. Terhadap program kegiatan di Tahun 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan Tahun 2022 sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan, serta usulan Komisi V DPR RI.
3. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Dirjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR:
 - a. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi serta kerja sama dengan berbagai pihak.
 - b. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan internal demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan.
 - c. Melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang utamanya pada kontrak di bawah 80% demi terwujudnya kualitas konstruksi yang baik.
 - d. Meningkatkan percepatan sertifikasi terampil bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi.

Mas Dewo, cukup?

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T.,M.T.):

Cukuplah setuju, yang penting tadi jawaban tertulisnya itu dikasih.

KETUA RAPAT:

Iya sama nanti kita rapat, nanti kita bahas sekalian waktu kita internal, Pemerintah?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Poin c nya, Pak Ketua,

KETUA RAPAT:

Poin c ,ya? Iya silakan Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Melakukan evaluasi dan Pak, ada ada kan untuk dan rapat khusus untuk dilaporkan evaluasi tersebut.

KETUA RAPAT:

Melakukan evaluasi rutin, kalau *gitu mesti* kalau rapat khusus, kita mesti buat poin sendiri, Pak, iya Komisi V DPR RI akan melakukan rapat khusus terkait persoalan-persoalan di Bina Konstruksi, Bina Kontruksi kan?

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Iya khusus Bina Konstruksi.

KETUA RAPAT:

Komisi V DPR RI akan melakukan rapat khusus, mengagendakan ya agendakan rapat khusus, mengagendakan, boleh juga mengagendakan rapat khusus terkait berbagai persoalan. Mengadakan rapat khusus terkait berbagai persoalan yang terdapat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, *gitu aja?* Cukup ya, Pak, ya?

F- PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya usul, Ketua, yang nomor dua itu agar adil, karena tadi belum banyak yang bicara, yang bicara banyak, Pak Dewo, tapi jangan sampai ada kata-kata dengan memperhatikan saran masukan serta usulan Komisi V karena lainnya belum bicara. Mungkin kalimat itu diperhalus, makasih.

KETUA RAPAT:

Poin, poin dua. Kalau ini saya rasa umumlah, ya, paling tidak mendengarkan yang tadi sudah bicara, *gitu* Pakde, umum saja saya pikir ini. Saya tanya dulu dari Sekretariat Jenderal keberatan *nggak* dengan poin 2?

F- PDIP (Ir. SUDJADI):

Pak Ketua, Pak Ketua. Saya hanya apa melihat, kita itu kan harus bersama-sama, ini memang ada Rapat Paripurna, sehingga lalu kata-kata Nomor 2 tadi mana? Dengan memperhatikan saran, masukan itu, itu yang bicara itu baru orang tiga, yang lainnya *ndak*, mungkin kalimat itu diperhalus dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang apa, apalah, tapi jangan sampai memberikan saran masukan itu, kita kan belum *ngomong*.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T.,M.T.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T.,M.T.):

Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada senior, kepada Pak Sudjadi, meskipun beberapa kawan yang bicara tapi itu sesungguhnya representatif dari Komisi V karena tadi ditawarkan kepada forum disepakati perwakilan masing-masing fraksi sudah dilaksanakan, bagaimana fraksi yang belum dapat giliran bicara? Juga ditawarkan kepada forum, itu pun juga bisa menerima, artinya ya, sudah representatif, semua yang disampaikan oleh kawan adalah representatif Komisi V. Ini...ini mohon maaf dengan tidak rasa mengurangi hormat kepada senior kami, karena ini juga umum sifatnya.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya setuju, cuma saya mengingatkan Komisi V itu miliknya orang banyak tapi ditawarkan oleh Ketua Poksi, Ketua Poksi kan baru dua itu tadi, yang, yang jawab, tiga kalau *ndak* salah, jadi, ya maksud saya suasana itu dijaga yang baik, terima kasih.

Mau terus *monggo*, *ra monggo* saya hanya mengingatkan, suasana kerukunan itu harus dijaga, terima kasih.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pimpinan ditawarkan aja izin, ditawarkan *aja* kepada kapoksi *udah* oke apa *nggak*, *gitu aja*. kalau kapoksinya *oke*, ya *udah*.

KETUA RAPAT:

Kalau kapoksi *sih udah oke*, tadikan sudah oke, sudah jawab semua, sudah jawab semua, justru saya tanya Pemerintah, *gitu loh*, karena kesepakatan ini kan bukan cuma kita *doang*, kalau Pemerintah *nggak* setuju *nggak* bisa. Pertanyaan saya Pak Dirjen, poin dua ini Pemerintah keberatan *ndak*?

DIRJEN BINA KONTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.):

Kami setuju, Pak, dengan ini, tidak keberatan.

KETUA RAPAT:

Setuju, dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pakde, ya, kita laksanakan saja ini karena memang normatif ini sebetulnya, di semua kesimpulan rapat kita seperti ini, iya, di semua kesimpulan rapat kita seperti ini termasuk pendapat, saran kita di rapat-rapat yang akan datang, terus kalau rapatnya *nggak* didengar, sarannya *nggak* didengar, *piye toh* rapat hari ini? Ya saya rasa cukup ya, kesimpulannya, Pak, ada mau ditambahkan cukup, Pak? yang terakhir, yang terakhir, sudah Pak, yang terakhir, Komisi V DPR RI akan mengadakan rapat khusus terkait persoalan isu strategis yang ada di Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, cukup?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan. Iya, kita minta tanggapan, saya lebih fokus tanggapan nanti soal apa yang tadi kita sampaikan itu, solusinya seperti apa melalui teman-teman LPJK juga, jadi LPJK ini yang paling penting menurut saya, ya.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih makanya kita khusus hanya dengan LPJK, nanti kita rapat khusus, ya, nanti apakah LPJK melibatkan Sekjen dengan Inspektorat Jenderal, ini sebenarnya *ndak* terpisahkan ini, Pak, tiga, tiga, tiga Eselon I ini Sekjen, Inspektorat Jenderal, dan LPJK, ini satu kesatuan sebetulnya, karena *reward and punishment* itu ada di Inspektorat Jenderal, ya, nanti urusan PU-lah Pak ya apakah nanti di rapat kami dengan Dirjen Bina Konstruksi, nanti Pak Sekjen atau Pak Inspektorat Jenderal mendampingi kami persilakan, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, dengan disepakatinya kesimpulan rapat, maka selesailah rapat kita hari ini. Saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala dalam rapat ini adalah hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri rapat pada hari ini dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan saya tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)

JAKARTA, 14 Februari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002